

Imam Aspuri

“Presiden RI 2014”

SRI SULTAN HB X !?

(Kumpulan Reportase, Berita, & Essai)

Penerbit:

Tenar Media

“PRESIDEN RI 2014” SRI SULTAN HB X !?

Oleh: *Imam Aspuri*

Copyright © 2011 by **Imam Aspuri**

Penerbit

Tenar Media

Email:

mandalaraya0033@yahoo.com

Desain Sampul:

Imas Media

Diterbitkan melalui:

www.nulisbuku.com

Ucapan Terimakasih:

Alhamdulillah... demikian pertama-tama saya ucapkan, dengan terbitnya buku kelima: **“Presiden RI 2014” SRI SULTAN HB X** dari buku-buku yang lain: *Perilaku Budeg & Mbudeg, "Dongeng" Kota 1001 Lampu, Di Atas Batu Tumbuh Bunga*, dan *Sri Sultan Hb X “Presiden RI 2014”* yang merupakan buku kumpulan reportase, berita, dan esai ini. Berkat kehendakNya apa pun bisa terjadi!

Tak lupa saya sampaikan jua penghargaan yang tak terhingga kepada *Nulis Buku Com* atas diterbitkannya buku **“Presiden RI 2014” SRI SULTAN HB X** ini, sehingga bisa hadir di hadapan pembaca.

Kepada siapa saja (yang tidak bisa disebutkan satu-satu di sini) yang sudah membantu baik secara langsung maupun hanya sekedar *spirit*, dll. berkaitan dengan terbitnya buku ini.

Teristimewa,

buat:

Istri dan anak-anakku tersayang!

**

*

KATA PENGANTAR

Buku **“Presiden RI 2014” SRI SULTAN HB X!?** merupakan buku tersendiri, terpisah dari buku sebelumnya, namun merupakan kelanjutannya. Karena ketika buku **Sri Sultan Hb X “Presiden RI 2014”** itu jauh-jauh hari disusun, tepatnya awal 2011, dan baru bisa akan diterbitkan akhir tahun 2012, namun *keburu* Sri Sultan HBX dilantik sebagai Gubernur DIY pada Rabu, 10 Oktober 2012. Sehingga terbit buku kedua ini dengan perubahan tersebut. Buku yang disusun cukup lama ini, semata-mata hanya terkait pada penyusunan buku-buku yang lain.

Namun perubahan UU No. 13/ 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang antara lain dengan pelantikan Gubernur DIY tersebut, nampaknya tidak mengubah Sri Sultan HB X sebagai Capres terkuat, dan yang paling *instan* saat ini. Apalagi, mengacu sejarah lahirnya kekuasaan (tahta) itu asalnya dari raja-raja, dimana Sri Sultan juga sorang raja; layaknya *titah* dari rakyat bagi *ing Ngarso Panjenenganipun* untuk duduk di kursi pertama RI pada tahun 2014 nanti?!

Bagi orang yang berpikiran sederhana, tanpa *neka-neko*, dan jernih tentu akan setuju Sri Sultan HB X menuju Presiden RI 20014 nanti, terutama dari segi dana pemilihan presiden (pilpres) yang sungguh teramat mahal. Dana pilpres yang tidak sedikit itu, misalnya bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat, dan pemerataan pembangunan.

Konon pasangan Jokowi pada putaran 2 Pilkada saja menghabiskan dana mencapai Rp. 65 M, sedang-

kan pasangan Fauzi diperkirakan Rp. 15 M. Total jendral biaya secara keseluruhan Pilkada DKI Jakarta itu sejak putaran 1 bisa jadi sampai Rp. 150 - 200 M.

Belum untuk biaya pelantikannya, yang ketika Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai Kepala Daerah DIY dianggarkan Rp 1,6 miliar, namun setelah melalui sejumlah pertimbangan, pelantikan dilaksanakan di Gedung Agung dengan dana tidak lebih dari Rp 400 juta, padahal jauh dari kemewahan karena diselenggarakan secara sederhana dan berlangsung singkat sekitar 30 menit dengan jumlah tamu pun sangat terbatas, yang semula direncanakan akan dihadiri sekitar 1.500 undangan.

Apalagi pilpres, teramat banyak uang dihambur-hamburkan? Kenapa tidak dialihkan untuk pembangunan, atau mensejahterakan rakyat? Karena dite-ngarai dari pilpres ke pilpres kehidupan berbangsa nan bernegara tidak semakin membaik, malah diidentikkan sedang menuju ke jurang kehancuran? Tak berlebihan, kalau sang Bambang Soesatyo bikin buku : **REPUBLIK GALAU, Presiden Bimbang, Negara Terancam Gagal!**

Barangkali bisa dicari formulasi lain, dan atau solusinya demi rakyat tentang pengangkatan SSHB X sebagai Presiden RI 2014 ?! Untuk itu, buku: **“Presiden RI 2014” Sri Sultan Hb X** yang merupakan buku kumpulan reportase, berita, dan esai ini memang jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari pembaca.

Penulis

“Presiden RI 2014” SRI SULTAN HB X

(Antara *Hambluminallah* dan *Habluminannas*)

Barangkali diantara tujuh calon Presiden (Capres) hasil konvensi Partai Golkar (PG) itu Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah orang yang lebih instan atau siap pakai untuk menjadi Presiden RI ke 6 tahun 2004 mendatang. Selain berpengalaman dibidang eksekutif (pemerintah) maupun legeslatif (wakil rakyat), Sri Sultan ditengarai “bersih” dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan juga dinilai bermoral tinggi.



Sri Sultan X adalah Gubernur DIY sejak tahun 1998 hingga sekarang. Apakah itu cukup sebagai ‘modal’ untuk memimpin wilayah lebih luas dan lebih besar lagi yang bernama Indonesia, yang terdiri dari bermacam-macam etnik atau suku bangsa? Ada yang bilang melihat DIY adalah melihat miniatur

Indonesia selain sebutan DIY sebagai Kota Pelajar, Budaya dan Pariwisata. Yang jelas, pemerintah di Propinsi itu representasi, dari Pemerintah Nusantara dalam bentuk yang lebih sempit. Dan idealnya, jabatan pemimpin itu berjenjang. Artinya seorang untuk menjadi presiden ia mesti menjadi gubernur lebih dulu.

Selain dalam bidang legislatif, Sri Sultan juga berpengalaman di organisasi. Mulai tahun 1972 Sri Sultan aktif di Golkar, tahun 1977 sampai 1982 dipercaya sebagai Ketua Golkar Propinsi DIY, tahun 1978-1983 juga merangkap sebagai Ketua DPRD Propinsi DIY, tahun 1983-1987 anggota DPR RI dan tahun 1982-1997 jadi anggota MPR RI dari DIY.

Sri Sultan juga orang yang konsisten. Disaat Golkar dimaki, dihina dan diintimidasi, serta banyak orang dan pejabat yang meninggalkannya, Sri Sultan justru berterus terang tetap di partai yang bergambar beringin itu, “Dan saya belum pernah meninggalkan Golkar,” tegas Sri Sultan dalam temu kader PG dengan DPP di kantor DPD II PG. Kab. Pemalang Minggu (28/12) lalu.

Memang betul, ungkap Sri Sultan, tahun 1997 setelah dia menjadi Gubernur DIY, karena dia bukan pengurus lagi dia tidak aktif di Golkar dan pada waktu kampanye 1999 dia tidak ikut kampanye PG. Karena ketentuan saat itu setiap pejabat daerah berasal dari gubernur tidak bisa ikut kampanye. Ketentuan itu dia anut ternyata salah “Mengapa salah? ternyata Presiden RI, Ketua MPR dan Ketua DPR juga masih rangkap jabatan. Jadi mengapa kalau

beliau-beliau boleh, saya 2004 tidak boleh kampanye?”, ucapnya balik bertanya.

Bukankah Sri Sultan HB X orang Orde Baru (ORBA)? Nanti dulu! Dia memang hidup dan menjabat dalam sebuah “sistem pemerintahan Orba, meski “terkungkung” pada otoriter pucuk kepemimpinannya tak mencerminkan rezim yang berkuasa saat itu. Seperti halnya kebanyakan para pemimpin di daerah (ikut) yang memungkinkan kekuasaan bisa membuat ‘mabuk’ berkuasa, terlebih dengan tahtanya itu, Sri Sultan tetap bersahaja dan jauh dari godaan (maaf; gosip) wanita, apalagi terdengar kabar memiliki Dinasty. Padahal seperti sekarang saja dengan adanya otonomi daerahpun bermunculan “Dinasty atau raja-raja kecil di daerah”.

Jadi Sri Sultan bukanlah bagian dari Orba, tapi “system” rezim kekuasaan itu yang melingkupnya. Namun, apakah yang dilakukan Orba semuanya jelek? Tentu selain ada kelemahan-kelemahannya, ada juga yang baik. Menurut Wakil Ketua MPR, Ginandjar Kartasasmita (Modus, 15-21/12), tokoh reformis yang ada sekarang ini juga bagian dari orba di masa lalu, seperti Abdurahman Wahid (Gusdur) tadinya adalah anggota DPR dari Golkar dan Megawati dari PDI yang lama. “Sudah saatnya tidak lagi-lagi menyebut Orba, Orla ataupun Reformis, karena seluruhnya sudah sama didalamnya demokrasi yang makin baik,” pintanya.

Sedangkan Ketua Tanfidziah PBNU, KH. Hasyim Muzadi menyatakan, masa lalu (Orba) yang baik harus kita adopsi. Yang mendesak dilakukan,

bangsa kita harus segera menemukan sinte-sis dari Orba. Hari ini kita masih pada situasi antitesis Orba. Sintesis ini yang harus segera ditemukan. Masa lalu yang baik harus kita adopsi. Tak usah secara diamentral di jauhi. “Ini penyakit bangsa kita. Kalau terjadi suatu pergantian kekuasaan, semuanya seolah harus berganti. Akhirnya ya kayak Ken Arok,” ujarnya.

Yang pasti, Sri Sultan HB X adalah orang yang berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Konsekuesinya, dia berani menentang arus. Di saat yang seharusnya, dilakukan banyak pejabat dan para gubernur, dia satu-satunya gubernur yang berani mengoreksi pimpinannya (Orba) yang dinyatakan dalam Deklarasi Ciganjur bersama Gus Dur, Amien Rais, dan Megawati itu.

Namun di depan kader-kader PG di Pemalang itu Sri Sultan menyatakan hal tersebut sesuatu yang wajar, kalau dia berani melangkah pada 20 Mei 1998 lalu dia meminta rakyat Yogya untuk mendukung reformasi. Karena menurutnya pemerintahan saat itu dia anggap menyalahi prinsip-prinsip makro mikro cosmos. Di mana pemimpin yang mengabdikan untuk rakyat sebagai kewajiban yang harus dilakukan, tapi ternyata pemimpin minta bagian dari pengabdiannya.



“Buktinya apa? Ya ada kroni ‘dinasti’ itu kan bagian dari duniawi kepentingan pemimpin,” ucapnya.

Sekarang dengan kepemimpinan Presiden RI Megawati Soekarnoputri, berani? “Jadi bagi saya siapa-pun presidennya, termasuk yang sekarang ya kan? Kalau memang menyalahi pemahaman saya makro-mikro ya saya bicara apa adanya yang saya katakan. Untuk ini pun saya berani mengatakan, bahwa kehidupan sekarang tidak juga lebih baik dari pada kemarin. Ya kan? Saya juga mengatakan, bahwa dimana pun terjadi *money politic*. Wong itu fakta kok!” ujar Sri Sultan.

Sri Sultan juga berani meminta pimpinan organisasinya, Akbar Tanjung mundur dari konvensi Nasional Pilpres Golkar (MODUS, 4-10/8). Alasan dia, ikutnya Ketua Umum DPP PG itu dikhawatirkan konvensi jadi tidak fair lagi. Jika Akbar Tanjung mundur dulu sebagai Ketua Umum DPP PG, maka posisi dan kedudukannya akan sama dengan para peserta konvensi Capres PG lainnya. “Agar Konvensi PG berjalan fair, Akbar Tanjung harus mundur dulu. Bila tidak, konvensi bisa dianggap tidak fair karena diikuti oleh Ketua Umumnya,” ucap Sri Sultan.

Bagaimana Sri Sultan HB X sebagai seorang yang berani dan lebih berani dari ayahnya (Alm) Sri Sultan itu? “Kebetulan saya ini jadi orang yang mungkin memang punya beban mengabdikan rakyat ini memang pilihan saya.....

***Selamat melanjutkan membaca buku ini
dalam situasi yang beda !!!***